LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN AGUSTUS DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 9 September 2022

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 69,34 %

b. Keuangan = 12.998.866.644 (63,22%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.175.000			2.675.000		
1	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	6.175.000	50	47,26	2.675.000	(2,74)	Honor narasumber digeser ke SSK lain pada waktu perubahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000			4.350.000		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100	87	4.350.000	(13)	Menyesuaiakan kebutuhan (perubahan)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.675.000			6.550.000		
1	4. Pelaksanaan Koordinasi Puspaga	7.675.000	100	85,34	6.550.000	(14,66)	alokasi dana untuk penjangkauan sudah akan habis, maka alokasi dana ini rencana akan dimasukkan untuk dana penjangkauan.
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	54.460.000			1.674.996		
1	4. Persiapan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah	6.790.000	100	24,89	1.674.996	(75,11)	Pelaksanaan KFA diundur karena menyesuaikan jadwal Forum Anak yang sekolah dan Ospek universitas
2	5. Pelaksanaan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah	47.220.000	100	0	0	(100)	Pelaksanaan KFA diundur karena menyesuaikan jadwal sekolah Forum Anak dan masa Ospek Universitas
3	6. Evaluasi Konferensi Forum Anak Jawa Tengah	450.000	100	0	0	(100)	Pelaksanaan KFA mundur sehingga evaluasi belum bisa dilaksanakan
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	39.880.000			18.279.712		
1	Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO	36.375.000	100	47,50	17.279.712	(52,50)	bahasan dalam rakor berkembang dan mengikuti isu terkini sehingga dibagi menjadi beberapa pertemuan. 1. tentang kebijakan perlindungan anak (perda 4 tahun 2022) 2. tentang perlindungan anak di ranah transportasi publik 3. tentang kebijakan perlindungan anak (rapergub perlindungan anak)
2	Pemantauan dan Evaluasi Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO	3.505.000	100	28,53	1.000.000	(71,47)	bahasan dalam rakor berkembang dan mengikuti isu terkini sehingga dibagi menjadi beberapa pertemuan. 1. tentang kebijakan perlindungan anak (perda 4 tahun 2022) 2. tentang perlindungan anak di ranah transportasi publik 3. tentang kebijakan perlindungan anak (rapergub perlindungan anak)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	43.586.000			0		
1	Persiapan Pelatihan Manajemen Kasus	4.716.000	100	0	0	(100)	masih menunggu

	KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA						modul manajemen kasus (Cekatan)
2	Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA	38.870.000	100	0	0	(100)	masih menunggu modul manajemen kasus (Cekatan)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.760.000			4.094.731		
1	Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	7.466.000	100	59,28	4.094.731	(40,72)	SSK diundur pelaksanaannya mengikuti jadwal mitra kerja BKOW
2	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	16.294.000	100	0	0	(100)	SSK diundur pelaksanaannya mengikuti jadwal mitra kerja BKOW
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	12	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	1	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan :

Pada Bulan Agustus terdapat 7 kegiatan yang mengalami deviasi antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
3. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Koordinasi Puspaga;
4. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi terdapat 3 SSK yang mengalami deviasi negatif

yaitu Persiapan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah, Pelaksanaan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah, dan Evaluasi Konferensi Forum Anak Jawa Tengah;

5. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO dan Pemantauan dan Evaluasi Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO;
6. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA dan Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA;
7. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW dan Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW;
8. Hibah Queensland untuk anak belum sepenuhnya tersalurkan (Seksi PHA);
9. Anggaran DAK pada kode rekening tenaga ahli dan makan minum client masih belum terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan (Seksi PP)
10. Anggaran DAK pada kode rekening perjalanan dinas untuk pendampingan dan penjangkauan perempuan dan anak sudah terserap semua (Seksi PP)
11. Masih tingginya unmeet need di 24 kab/kota yang berstatus merah, berstatus kuning 5 kab/kota, berstatus hijau 4 kab/kota, berstatus biru 2 kab/kota (Bidang KB KIE).
12. Kegiatan terkait dengan mitra kerja BKOW dan DWP menyesuaikan jadwal mitra (Seksi Parmas)
13. Masih banyak kab/kota yang belum input data di NEW SIGA, terutama bulan Juli dan Agustus. Data di New Siga tidak up to date, hanya data K-0 yang diisi oleh kab/kota (Bidang Dalduk KS)
14. Perpindahan aplikasi pelaporan dari Dallap ke New Siga, sekaligus updating data riil di kab/kota sehingga kelompok yang sudah tidak aktif tidak dilaporkan menjadikan turunnya kelompok aktif (Bidang Dalduk KS)
15. Tidak semua kab/kota mampu melakukan pendampingan lanjutan kegiatan PPEP (Seksi KHP)
16. Penyusunan rapergub masih terkendala waktu dari tim penyusun (Seksi PA)
17. DAK Manajemen Kasus belum dapat dilaksanakan karena menunggu modul Manajemen Kasus (Cekatan) selesai (Seksi PA)
18. Piagam dan Surat Keputusan Gubernur terkait Penggerakan KB masih proses dari bulan maret (Seksi KIE)
19. Inputing data New SIga dari tingkat desa melalui PLKB terkendala aplikasi dan jaringan (Seksi KIE)
20. Inputing data Layanan KB pada New SIGA oleh PLKB atau kader sering terlambat (Seksi KIE)

Upaya :

1. Mempercepat verval penerima bantuan hibah queensland untuk anak (Seksi PHA)
2. Melakukan pergeseran kode rekening tenaga ahli, makan minum client ke rekening SPPD (Seksi PP)
3. Penggerakan KB bersama mitra di bulan September (Baksos TMKK) di 3 kab/kota (Sukoharjo, Temanggung, Banyumas)
4. Safari pelayanan KB dalam rangka HUT Jateng dan HUT RI di 3 kab/kota (Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Jepara)
5. Kegiatan dengan mitra BKOW (menyesuaikan kebutuhan mitra) dan DWP (HUT DWP 7 Desember) akan dilaksanakan di bulan Desember (Seksi Parmas)
6. Koordinasi dengan BKKBN dan kab/kota (Dalduk KS)
7. Pengumpulan data dukung hibah Queensland untuk bantuan ekonomi produktif kelompok rentan (Seksi KHP)
8. Koordinasi dengan tim penyusun rapergub dilakukan melalui grup WA (Seksi PA)
9. Koordinasi dengan Kemen PPA dan Unicef untuk percepatan penyelesaian modul Manajemen Kasus (Cekatan) (Seksi PA)
10. Berkoordinasi dengan TU Gubernur secara aktif (Seksi KIE)

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Pelatihan PPEP (Seksi KHP)
2. Konferensi Forum Anak di Semarang (Seksi PHA)
3. Mempersiapkan tahap ke-2 untuk hibah Queensland (Seksi PHA)
4. Sosialisasi pencegahan KTPA dan TPPO (Implementasi UU TPKS bersama pentahelix) (Seksi PP)
5. Rapat inisiasi membuat RAD pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bulan Oktober (Seksi PP)
6. Rapat inisiasi membuat RAD KB Dalduk berbasis KIE (Seksi KB)
7. Penggerakan KB bersama mitra di bulan September (Baksos TMKK) di 3 kab/kota (Sukoharjo, Temanggung, Banyumas) (Seksi KB)
8. Safari pelayanan KB dalam rangka HUT Jateng dan HUT RI di 3 kab/kota (Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Jepara) (Seksi KB)
9. Bimbingan teknis penyusunan studi kelayakan kelompok UPPKA (Seksi KS)

10. Monitoring dan Evaluasi GDPK di 2 kab/kota (Seksi Dalduk)
11. Pelaksanaan pembuatan Greenhouse dengan ukuran 7x10 bibit cabai 15 pack, rak reagen 60, polybag 43 bendel, sprayer, pestisida, selang, gembor di desa Kwadungan yang akan dilaksanakan setelah perubahan (Seksi KS)
12. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan di 5 titik (Seksi KHP)
13. Penyusunan Pergub PUG (Seksi KHP)
14. Sosialisasi dan Advokasi Perda Ketahanan Keluarga di kab/kota (Seksi KHP)
15. Kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap anak dan TPPO (Seksi PA)
16. Penggerakan dan Bakti Sosial TMKK (Seksi KIE)
17. Pengadaan Dispenser dan TV (Umum dan Kepegawaian)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya.
7. Bidang diminta untuk segera input ATK, ATB (Aset Tidak Berwujud) sesuai aplikasi. Jika tidak ada diisi nihil;
8. SPSE pengadaan langsung maupun tidak langsung tetap diinput
9. P3DN dan blankon diinput rutin
10. Penyamaan persepsi terkait surat pertimbangan KPA apabila memakai mobil rental

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan Juni 2022, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	65.12	69.33	63.22	4.21
2	Sekretariat	66.53	69.44	66.93	2.91
3	Bidang KHPP	66.67	72.88	69.93	6.21
4	Bidang PHPA	56.49	55.18	23.81	(1.31)
5	Bidang KB KIE	69.75	79.14	75.84	9.39
6	Bidang DALDUK KS	44.98	72.22	61.95	27.24
7	Bidang Data Parmas	68.68	76.00	72.85	7.32

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juli 2022 untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 9 September 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 19681124199310200l